

# **IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 185 TAHUN 2017 TENTANG KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN**

**Dayinta Dewayani Hidayat**

## **Abstrak**

Kesehatan reproduksi dan kesiapan mental merupakan aspek penting bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga yang berkualitas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 sebagai upaya memastikan hal tersebut. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut dengan fokus pada pelaksana dan calon pengantin sebagai subjek utama. Penelitian dilakukan pada tahun 2025 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa dan Biro Kesejahteraan Sosial Setda DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil menunjukkan implementasi berjalan cukup baik melalui sistem digital Jakevo, koordinasi antarinstansi, dan keterlibatan pelaksana. Namun, hambatan seperti prosedur administratif yang rumit, keterlambatan hasil pemeriksaan, dan minimnya sosialisasi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penyederhanaan prosedur, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi digitalisasi dalam layanan pranikah.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan, Konseling pranikah, Pemeriksaan kesehatan pranikah

# **IMPLEMENTATION OF JAKARTA GOVERNOR REGULATION NUMBER 185 OF 2017 CONCERNING COUNSELING AND HEALTH EXAMINATIONS FOR PORSPECTIVE BRIDES AND GROOMS**

**Dayinta Dewayani Hidayat**

## **Abstract**

Reproductive health and mental readiness are essential aspects for prospective couples in building a quality family. The Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation Number 185 of 2017 as an effort to ensure these aspects. This study analyzes the implementation of the policy, focusing on implementers and prospective brides and grooms as the main subjects. The research was conducted in 2025 at the Office of Religious Affairs (KUA) of Jagakarsa District and the Bureau of Social Welfare of the DKI Jakarta Provincial Secretariat. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through in-depth interviews, observations, and document reviews. The results show that the implementation has been fairly effective through the use of the Jakevo digital system, inter-agency coordination, and strong engagement from implementers. However, challenges remain, such as complex administrative procedures, delays in health examination results, and limited outreach to prospective couples. Therefore, strategies such as simplifying procedures, strengthening cross-sectoral coordination, and optimizing digitalization in premarital services are needed.

**Keywords:** *Policy implementation, Premarital counseling, Premarital health screening*